

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)



## TAHUN 2024



**PEMERINTAH KOTA BAUBAU**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
JL. Dayanu Ikhsanuddin No. 69 Kota Baubau

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatNya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau Tahun 2024 dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Dalam rangka terselenggaranya Pemerintah yang baik (good governance) serta mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita – cita berbangsa dan bernegara maka diterbitkan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan tindaklanjut dari TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 dan Undang – undang No. 28 Tahun 1999 yang keduanya mengatur tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja yang terukur dan transparansi dalam menjalankan pemerintahan yang baik (good government). Selain itu merupakan evaluasi hasil pencapaian tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau sebagai penjabaran dari visi, misi dan perencanaan strategis yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dokumen LAKIP BPBD Kota Baubau ini dilakukan untuk mengetahui pencapaian kinerja yang telah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau terhadap apa yang telah laksanakan selama tahun 2024 dalam pelaksanaan sasaran strategis dengan indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam dokumen Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2024 - 2026

Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan terutama kepada para pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan ini sehingga dapat terlaksana dengan baik. Tentunya masih terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan ini, saran dan masukan sangat kami hargai untuk bahan perbaikan. Akhirnya kami berharap semoga laporan LAKIP BPBD Kota Baubau ini dapat memberikan manfaat terutama dalam menyusun Renstra untuk lima tahun mendatang serta mendukung kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau yang semakin baik

Baubau, Februari 2025

Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kota Baubau



**LA ODE MUSLIMIN HIBALI, SE., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690629 198903 1 009

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Gambaran Umum Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau .....	2
1.3. Landasan Hukum .....	12
1.5. Sistematika Penulisan .....	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	14
2.1. Rencana Strategis .....	14
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	22
2.3. Perjanjian Kinerja .....	23
2.4. Program dan Kegiatan .....	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	36
3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja .....	36
3.2. Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau .....	38
3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis .....	39
3.4. Realisasi Anggaran .....	65
BAB IV P E N U T U P .....	73
4.1. Kesimpulan .....	73
4.2. Saran .....	74

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Bangsa Indonesia sekarang ini dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis dan mempengaruhi birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma pemerintahan yang baik (Good Governance) yang memberikan peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya antara lain: Transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga alasan tersebut dapat diterapkan maka prinsip dasar dari Good Governance tersebut dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan institusi pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerja kepada masyarakat. Terselenggaranya pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan persyaratan bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa mendatang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang akan timbul.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah. LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Baubau melalui Sekretaris Daerah Kota Baubau. Salah satu bentuk pertanggungjawaban sebagai Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) berkewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Instansi pemerintah (LAKIP) untuk mempertanggung jawabkan penggunaan sumber daya organisasi, mulai dari SDM, sarana dan prasarana dan sanggaran sebagaimana ditetapkan dalam APBD Kota Baubau. LAKIP BPBD Kota Baubau Tahun 2024 disusun berdasarkan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau Tahun 2024-2026.

## **1.2. Gambaran Umum Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau, dan dijabarkan dalam Peraturan Walikota Baubau Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kota Baubau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada sub urusan Bencana yang menjadi kewenangan daerah dengan klasifikasi A. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas, yaitu :

- a. Menetapkan pedoman dan Pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan merata;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Baubau, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Baubau mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

### **1. Kepala**

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Baubau secara ex officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Baubau mempunyai tugas :

1. Mengarahkan perumusan kebijakan Wali Kota bidang penanggulangan bencana;
2. Merumuskan kebutuhan anggaran rencana kerja dan pelaksanaan anggaran untuk Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
3. Menetapkan pedoman dan rencana kerja terhadap pelaksanaan kebijakan dalam usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata;
4. Menetapkan Standarisasi serta kebutuhan penyelenggaran penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang undangan;

5. Menetapkan prosedur tetap penanganan bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Melakukan tindakan cepat lainnya dalam rangka penanggulangan Bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Melaporkan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana kepada Wali Kota; dan
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Baubau, menyelenggarakan fungsi :

1. Pengkoordinasian dan sinkronisasi perumusan kebijakan dan rencana kerja penanggulangan Bencana Daerah dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
2. Pengkoordinasian pengintegrasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan Bencana Daerah secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
3. Pengkoordinasian mobilisasi sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan Bencana Daerah;
4. Pengendalian penggunaan anggaran dan barang yang bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah;
5. Pemberian komando dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan Bencana Daerah; dan

6. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **1. Unsur Pengarah**

Unsur Pengarah penanggulangan bencana daerah terdiri atas :

- a. Pejabat Pemerintah Daerah terkait
- b. Anggota masyarakat professional dan ahli

### **2. Unsur Pelaksana.**

- Unsur Pelaksana berada dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD Kota Baubau.
- Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana BPBD sehari-hari.
- Unsur Pelaksana BPBD mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi, meliputi :
  - a. Pra bencana
  - b. Saat tanggap darurat, dan
  - c. Pasca bencana
- Unsur Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pengkoordinasian
  - b. Pengkomandoan
  - c. Pelaksana
- Unsur Pelaksana BPBD terdiri dari :
  - 1) Kepala Pelaksana  

Kepala Pelaksana mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kepala Badan sehari-

hari serta melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

2) Sekretariat Pelaksana,

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas Badan dalam pelayanan administrasi dan ketatausahaan kepada semua unit kerja di lingkungan Badan meliputi urusan perencanaan program, keuangan, umum dan kepegawaian, serta mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan tahunan.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian, dan masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Ketiga Sub Bagian pada Sekretariat yaitu :

- a. *Sub Bagian Umum dan Kepegawaian*
- b. *Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan*
- c. *Sub Bagian Keuangan*

3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pra bencana serta memberdayakan masyarakat.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Penentuan kedudukan dan tanggung jawab Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan disesuaikan dengan Struktur Organisasi Badan.

4) Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana dan dukungan logistik.

Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Penentuan kedudukan dan tanggung jawab Bidang Kedaruratan dan Logistik disesuaikan dengan Struktur Organisasi Badan.

5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana pada Pasca Bencana.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Penentuan kedudukan dan tanggung jawab Rehabilitasi dan Rekonstruksi disesuaikan dengan Struktur Organisasi Badan

- 6) Kelompok Jabatan Fungsional
- 7) Kelompok Jabatan Pelaksana

Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) selaku pejabat pemberi kinerja melalui pejabat administrator. Penentuan kedudukan tanggung jawab disesuaikan dengan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Penanggulangan Bencana daerah hasil penyetaraan jabatan administrasi adalah fungsional Analis Kebijakan dan fungsional Analis Kebencanaan.

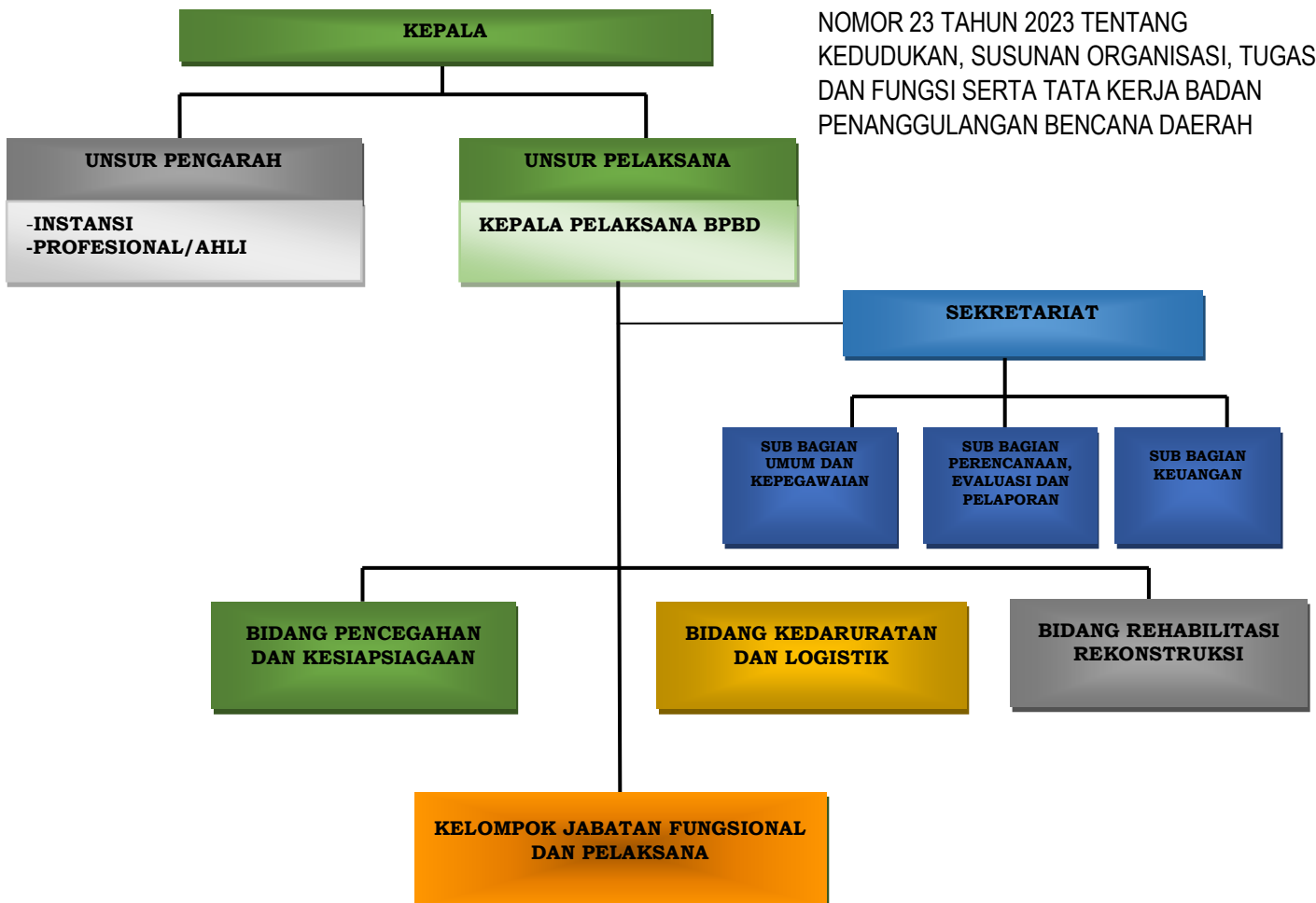
Tugas Pokok Jabatan Fungsional Analis Kebijakan yaitu melaksanakan kajian dan analisis kebijakan. Analis Kebijakan dapat melaksanakan seluruh kegiatan pada sub unsur kajian dan analisis kebijakan baik secara individual maupun dalam tim berdasarkan penugasan secara tertulis dari pejabat penilai kinerja.

Tugas Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan yaitu melaksanakan Analisis Kebencanaan yang meliputi penyiapan bahan substansi teknis pengaturan bidang kebencanaan, perencanaan analisis bidang kebencanaan pelaksanaan analisis bidang kebencanaan, pemantauan dan evaluasi, dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria.

Dalam hal tidak terdapat analisis kebencanaan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan tersebut, analisis kebencanaan yang berada satu tingkat diatas dan/atau satu tingkat dibawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pejabat penilai kinerja.

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

PERATURAN WALIKOTA BAUBAU  
NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau didukung dengan jumlah tenaga 63 orang, dengan rincian 18 orang PNS BPBD dan 45 orang merupakan tenaga relawan / Satuan Tugas Penanggulangan Bencana. Jumlah pegawai BPBD Kota Baubau berdasarkan Tingkat Pendidikan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1. Jumlah PNS dan Relawan BPBD Kota Baubau Tahun 2023

No	Pendidikan	Status Kepegawaian		Jumlah
		PNS	Relawan	
1.	SMA	1	25	26
2.	D3	-	2	2
3.	S1	13	18	31
4.	S2	4	-	4
<b>Jumlah</b>		<b>18</b>	<b>45</b>	<b>85</b>

Dilihat dari **tabel 1.1** berdasarkan tingkat pendidikan tersebut diatas, Pegawai BPBD Kota Baubau sudah memadai dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugas kebencanaan, mensinergikan program / kegiatan baik antara BPBD Kota Baubau dengan BNPB dan BPBD Provinsi Sulawesi Tenggara, dan mensinergikan program / kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Sarana dan prasarana yang dimiliki guna memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau adalah sebagai berikut :

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jumlah</b>
1	Gedung	1 Unit
2	Kendaraan Roda Empat	4 Unit
3	Kendaraan Roda Dua	19 Unit
4	Speed Boat	1 Unit
5	Perahu Karet	1 Unit
6	Perahu Evakuasi	2 Unit

### **1.3. Landasan Hukum**

Landasan Hukum penyusunan LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
9. Peraturan Walikota Baubau Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Laporan akuntabilitas kinerja ini selain berpedoman pada Peraturan Menteri Pan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Disamping itu juga penyusunannya menyelaraskan dengan substansi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistematika penyusunan LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2024 dapat diilustrasikan dalam uraian singkat masing-masing Bab sebagai berikut :

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Gambaran Umum Organisasi
- 1.3. Landasan Hukum
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II. PERENCANAAN KINERJA**

- 2.1. Rencana Strategis
- 2.2. Indikator Kinerja Utama
- 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- 2.4. Program dan Kegiatan Tahun 2024

##### **BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**

- 3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja
- 3.2. Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Kota Baubau
- 3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis
- 3.4. Realisasi Anggaran

##### **BAB IV PENUTUP**

##### **LAMPIRAN**

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana termaktub dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) bahwa SKPD menyusun rencana startegis sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahunan dan Penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan Akuntabel, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

1. RPD Kota Baubau Tahun 2024-2026;
2. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau Tahun 2024-2026;
3. Penetapan Kinerja Tahun 2024.

### **2.1. Rencana Strategis**

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) merupakan dokumen yang disusun bagi daerah yang jabatan kepala daerahnya

berakhir di tahun 2022. Dokumen RPD menjadi acuan bagi OPD menyusun Renstra serta penyusunan RKPD. Dokumen RPD dengan RPJMD tidak memiliki banyak perbedaan mendasar, hanya tentang tidak adanya visi misi dan program kampanye pada dokumen RPD dikarenakan pemilukada serentak akan dilakukan di tahun 2024.

Dalam dokumen RPD ini memuat tujuan dan sasaran, di mana tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa datang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan. Rumusan pernyataan tujuan beserta indikatornya menjadi Indikator Kinerja Utama Kota Baubau. Sedangkan Sasaran adalah penjabaran dari tujuan atau hasil yang akan dicapai Kota Baubau dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan dari tahun 2024 sampai tahun 2026.

Kota Baubau merupakan salah satu kota yang menyusun RPD 2024-2026. Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Baubau tahun 2024-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Kota Baubau tahun 2005- 2025, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD tahun keempat serta isu strategis yang aktual.

Perencanaan pembangunan jangka panjang Kota Baubau diarahkan pada pemberdayaan sumber daya manusia untuk meningkatkan daya saing dan kualitas pemerintahan yang baik. Oleh

karena itu, visi pembangunan jangka panjang Kota Baubau tahun 2005-2025 adalah “

**“Terwujudnya Kota Baubau Sebagai Pusat Perdagangan Dan Pelayanan Jasa Yang Nyaman, Maju, Sejahtera Dan Berbudaya Pada Tahun 2025”**

Sebagai upaya perwujudan visi pembangunan jangka panjang tersebut, maka dirumuskan misi pembangunan jangka panjang sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kota Baubau sebagai pusat perdagangan dan jasa regional maupun nasional;
2. Mewujudkan sistem pengelolaan lingkungan hidup, penataan ruang, dan keindahan Kota;
3. Mewujudkan Ketentraman, ketertiban, keamanan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas kehidupannya;
4. Mewujudkan Kota Baubau yang mandiri, kuat dan maju yang berbasis pada kemampuan dan keunggulan lokal;
5. Mewujudkan kondisi kehidupan masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan hidup lahir dan batin yang cukup seimbang dan berkelanjutan;
6. Mewujudkan tata kehidupan yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur, adat istiadat dan tradisi serta kearifan lokal yang menjadi jati diri masyarakat Kota Baubau; dan Mewujudkan tatakelola pemerintahan daerah yang demokratis dengan berbagai

kemudahan pelayanan administrasi dan pelayanan publik pemerintah.

Penyusunan RPD Kota Baubau Tahun 2024-2026 mengacu pada tahapan dan prioritas pembangunan tahun ke 4. Tahapan pembangunan jangka panjang merupakan penjabaran dari misi dan sasaran pembangunan. Tahapan ini menunjukkan langkah- langkah perlima tahunan yang hendak dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat Kota Baubau dalam rangka mencapai Visi Jangka Panjang. Periode lima tahunan keempat merupakan periode terakhir Pembangunan Jangka Panjang dua puluh tahunan 2005-2025, sehingga pada periode ini diharapkan terwujud visi jangka panjang Kota Baubau. Sebagai kelanjutan pembangunan dari periode lima tahunan sebelumnya, Periode IV ini lebih menekankan pada pemantapan Kota Baubau sebagai pusat pelayanan jasa dan perdagangan melalui peningkatan kualitas produksi barang dan layanan jasa dengan penerapan manajemen mutu. Adapun prioritas pembangunan pada periode ini adalah sebagai berikut:

- a. Pemantapan peran Kota Baubau sebagai pusat layanan jasa dan perdagangan melalui penerapan teknologi yang lebih maju guna mendukung tumbuh kembangnya industry layanan jasa dan barang yang didukung oleh basis produksi yang unggul dan adanya interaksi antar industri yang saling menguntungkan baik skala regional, nasional, hingga internasional;
- b. Penerapan manajemen mutu sebagai gugus kendali optimalisasi layanan jasa dan perdagangan, dan struktur industri diperkuat dengan

menjadikan industri kecil dan menengah sebagai basis industri yang sehat, mampu tumbuh, dan terintegrasi dalam mata rantai pertambahan nilai dengan industri hilirnya dan dengan industri yang berskala lebih besar;

- c. Penyediaan dan modernisasi berbagai infrastruktur bagi peningkatan kapasitas kolektif yang meliputi sarana dan prasarana fisik transportasi, komunikasi, energi, sarana dan prasarana teknologi, sehingga mampu secara efektif mendukung peningkatan produksi dan daya saing Kota Baubau sebagai pusat layanan jasa dan perdagangan;
- d. Pengembangan kualitas sumber daya manusia yang mampu mengembangkan, menguasai, dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap berlandaskan nilai-nilai religi, sekaligus memantapkan kemandirian masyarakat;
- e. Pengembangan sistem pelayanan prima dan tata pemerintahan yang baik melalui penataan peranan pemerintah sebagai fasilitator, regulator, sekaligus katalisator sehingga tercipta efisiensi dan efektivitas pelayanan masyarakat pada berbagai tingkatan;
- f. Peningkatan nilai tambah atas pemanfaatn SDA ya.ang terbarukan melalui diversifikasi dan inovasi pengelolaannya, sekaligus optimalisasi pemeliharaan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas SDA terbarukan, serta pengelolaan sumberdaya alam tidak terbarukan yang dikelola secara efisien, efektif dan profesional sehingga mampu memberikan nilai tambah yang optimal;
- g. Pengembangan kehidupan sosial budaya melalui transformasi, revitalisasi, dan reaktualisasi nilai-nilai budaya yang tumbuh ditengah

- masyarakat sehingga memunculkan kepercayaan diri dan menemukan jati diri masyarakat yang dapat menjadi potensi keunggulan masyarakat sekaligus mampu menerapkan nilai-nilai modern; dan
- h. Pemantapan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh, penguatan peranan masyarakat sipil dan mampu menghargai nilai-nilai HAM, nilai-nilai demokratis, nilai-nilai hukum, serta menciptakan stabilitas lingkungan dan dinamika politik yang kondusif ditengah masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau Tahun 2024–2026 merupakan implementasi dan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Baubau Tahun 2024– 2026. Dalam Renstra dijabarkan potret dan rencana pembangunan yang memuat Tujuan, Sasaran dan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu yang ditentukan.

Pencapaian pembangunan daerah tidak lepas dari peran perangkat daerah, dengan mengaitkan kebijakan daerah dengan perangkat daerah menjadi salah satu tahapan penting dalam melihat konsistensi antara implementasi pelaksanaan pembangunan dengan perencanaan pembangunan. Keberhasilan pencapaian IKU daerah memerlukan kontribusi capaian perangkat daerah di Kota Baubau. Keterkaitan tujuan, sasaran, serta arah kebijakan daerah dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1. Keterkaitan IKU Daerah dengan IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau Tahun 2024-2026.

<b>TUJUAN/ SASARAN DAERAH</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN DAERAH</b>	<b>TUJUAN/ SASARAN OPD</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN OPD</b>
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam penanganan bencana daerah	Indeks Ketahanan Daerah
Meningkatnya kehidupan masyarakat yang kondusif, tertib dan aman	Angka Kriminalitas	Meningkatnya kualitas penanganan bencana alam	Rata-rata Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) penanganan bencana alam
		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Meningkatnya kualitas Kinerja Pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tingkat Capaian indikator program Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu, yaitu satu sampai dengan tiga tahun kedepan dalam tahun 2024 - 2026, serta menggambarkan arah strategik organisasi, perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi, serta meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan

Tujuan Jangka Menengah BPBD Kota Baubau adalah

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam penanganan bencana daerah.
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Tujuan ini selanjutnya diukur dengan indikator tujuan yang dijabarkan pada tabel 2.2.

Tabel 2.2. Uraian Tujuan dan Indikator Tujuan BPBD Kota Baubau

Tujuan	Indikator	Target	
		Awal	Akhir
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam penanganan bencana daerah.	Indeks Ketahanan Daerah	0,30	0,34
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	B	B

Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan ke sasaran. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah.

Pada Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau Tahun 2024-2026 terdapat 2 (dua) sasaran strategis, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas penanganan bencana alam
2. Meningkatnya kualitas Kinerja Pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sasaran ini diukur dengan indikator sasaran dengan target pencapaiannya pertahun dijabarkan pada tabel 2.3.

Tabel 2.3. Uraian Sasaran dan Indikator Sasaran BPBD Kota Baubau

Sasaran	Indikator	Target	
		Awal	Akhir
Meningkatnya kualitas penanganan bencana alam	Rata-rata Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) penanganan bencana alam	50%	60%
Meningkatnya kualitas Kinerja Pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tingkat Capaian indikator program Badan Penanggulangan Bencana Daerah	68,20	68,40

## 2.2. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja Utama akan dapat memberikan gambaran suatu ukuran keberhasilan Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Walikota Baubau Nomor 1 Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Baubau Tahun 2024 - 2026 ditetapkan bahwa Indikator Kinerja Utama pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau dirumuskan untuk mengukur kinerja BPBD Kota Baubau dan untuk lebih meningkatkan kualitas perencanaan, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4. Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Target Tahun			Target Akhir RPD (2026)
	2024	2025	2026	
Indeks Ketahanan Daerah	0,30	0,32	0,34	0,34
Rata-rata Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) penanganan bencana alam	50%	55%	60%	60%
Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	B	B	B	B
Tingkat Capaian indikator program Badan Penanggulangan Bencana Daerah	68,20	68,30	68,40	68,40

### 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah, untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Penyusunan perjanjian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau Tahun 2024 mengacu pada Dokumen Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau Tahun 2024 –

2026, Rencana Kinerja Tahun 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 beserta perubahannya.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif dan akuntabel serta berorientasi pada hasil dan mencapai target kinerja, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan maka pada tahun 2024 ditetapkan target kinerja tahunan yang telah di tandatangi oleh Walikota Baubau, sebagai berikut :

Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2024  
Badan Penanggulangan Bencana Kota Baubau

<b>NO</b>	<b>TUJUAN/SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Masyarakat dalam Penanganan Bencana Daerah	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,30
2	Meningkatnya Kualitas Penanganan Bencana Alam	Rata-Rata Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Penanganan Bencana Alam	%	50
3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Predikat	B
4	Meningkatnya kualitas Kinerja Pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tingkat Capaian Indikator Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nilai	68,20

<b>No</b>	<b>Program</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Keterangan</b>
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.586.959.500	
2	Program Penanggulangan Bencana	729.995.200	
	<b>Jumlah</b>	<b>4.316.954.700</b>	

Tabel 2.6. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024  
Badan Penanggulangan Bencana Kota Baubau

<b>NO</b>	<b>TUJUAN/SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Masyarakat dalam Penanganan Bencana Daerah	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,30
2	Meningkatnya Kualitas Penanganan Bencana Alam	Rata-Rata Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Penanganan Bencana Alam	%	50
3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Predikat	B
4	Meningkatnya kualitas Kinerja Pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tingkat Capaian Indikator Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nilai	68,20

<b>No</b>	<b>Program</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Keterangan</b>
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.334.502.558	APBD
2	Program Penanggulangan Bencana	656.753.200	APBD
	<b>Jumlah</b>	<b>3.991.255.758</b>	

#### **2.4. Program dan Kegiatan**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah. Secara

keseluruhan, program memuat beberapa kegiatan dan setiap kegiatan dapat terdiri dari beberapa sub kegiatan. Adapun rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan serta target kinerja dan anggaran BPBD Kota Baubau Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7. Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
<b>I</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Rata-Rata hasil ketercapaian pelaksanaan program Pendukung OPD</b>	<b>100 %</b>	<b>3.365.419.010</b>
1.	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan</i>	100%	65.446.650
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	11.393.500
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.772.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	9.326.200
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	6.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10.633.300
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	11.077.900

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPBD KOTA BAUBAU TAHUN 2024**

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	11.243.750
2.	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	100%	2.247.741.850
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang	2.187.000.000
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	49.847.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.205.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	12 Laporan	5.689.850
3.	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah</i>	100%	12.222.700
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milk Daerah SKPD	1 Laporan	5.932.900
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.289.800
4.	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah</i>	100%	6.459.800
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	6.459.800
4.	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah</i>	100%	379.609.500
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.116.000

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPBD KOTA BAUBAU TAHUN 2024**

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	29.200.500
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.087.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	4.800.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	33.406.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	301.000.000
5.	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase barang milik daerah yang tersedia</i>	<i>100%</i>	<i>37.250.000</i>
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan	50 Unit	37.250.000
6.	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia</i>	<i>100%</i>	<i>518.784.000</i>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.800.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	79.685.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	30.049.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	404.220.000
7.	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</i>	<i>100%</i>	<i>319.475.000</i>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	16 Unit	88.740.000

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara yang dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	93.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	49.500.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 unit	18.140.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 unit	31.680.000
	<b>Program Penanggulangan Bencana</b>	<b>Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana</b>	<b>60%</b>	<b>729.995.200</b>
		<b>Persentase Warga Negara dan Aparat yang mengikuti pelatihan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana</b>	<b>60%</b>	
		<b>Persentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana</b>	<b>55%</b>	
1.	<i>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</i>	<i>Presentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kota Baubau</i>	<i>100%</i>	<i>31.689.000</i>
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota (Per Jenis Bencana) secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	100 Orang	31.689.000
2.	<i>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</i>	<i>Presentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</i>	<i>100%</i>	<i>492.611.408</i>
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	8 Kawasan	15.196.000

	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	25 Orang	74.767.000
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	400 Orang	48.280.800
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	40 Keluarga	35.108.000
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	4 Kawasan	306.207.400
3.	<i>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</i>	<i>Presentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</i>	100%	33.849.000
	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan	11.180.000
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	11.295.000
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	25 Orang	11.374.000
	<i>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</i>	<i>Presentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</i>	100%	184.898.000
	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 Dokumen	84.645.000
	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	3 Kegiatan	100.253.000

Tabel 2.8. Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
<b>I</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Rata-Rata hasil ketercapaian pelaksanaan program Pendukung OPD</b>	<b>100 %</b>	<b>3.365.419.010</b>
1.	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan</i>	100%	65.446.800
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	11.393.500
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.772.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	9.326.200
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	6.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	10.633.300
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	11.077.900
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	11.243.900
2.	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	100%	2.121.164.008
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/ Bulan	2.081.922.158

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPBD KOTA BAUBAU TAHUN 2024**

	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	28.347.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.205.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	12 Laporan	5.689.850
3.	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah</i>	100%	12.222.700
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milk Daerah SKPD	1 Laporan	5.932.900
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.289.800
4.	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah</i>	100%	10.459.800
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	10.459.800
4.	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah</i>	100%	446.258.800
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	29.200.500
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	40.050.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.234.300
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.600.000

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPBD KOTA BAUBAU TAHUN 2024**

	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	25.622.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	340.552.000
5.	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase barang milik daerah yang tersedia</i>	100%	32.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan	4 Unit	32.000.000
6.	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia</i>	100%	440.070.450
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	11.700.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	43.401.450
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	21.549.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	363.420.000
7.	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</i>	100%	206.880.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	14 Unit	69.060.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara yang dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	69.760.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	16.680.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 unit	31.680.000

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 unit	19.700.000
	<b>Program Penanggulangan Bencana</b>	<b>Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana</b>	<b>60%</b>	<b>656.753.200</b>
		<b>Persentase Warga Negara dan Aparat yang mengikuti pelatihan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana</b>	<b>60%</b>	
		<b>Persentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana</b>	<b>55%</b>	
1.	<i>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</i>	<i>Presentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kota Baubau</i>	<i>100%</i>	<i>31.689.000</i>
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota (Per Jenis Bencana) secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	100 Orang	31.689.000
2.	<i>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</i>	<i>Presentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</i>	<i>100%</i>	<i>492.611.408</i>
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	8 Kawasan	15.196.000
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	25 Orang	66.297.000
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	400 Orang	25.986.800
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	300 Keluarga	111.407.000
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana	4 Kawasan	306.207.400

		Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana		
3.	<i>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</i>	<i>Presentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</i>	100%	18.153.000
	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan	6.121.000
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	6.032.000
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	10 Orang	6.000.000
	<i>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</i>	<i>Presentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</i>	100%	81.817.000
	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 Dokumen	14.983.000
	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	2 Kegiatan	66.834.000

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat dijadikan sebagai hasil dari suatu penilaian yang sistematis berdasarkan pada kelompok indikator sesuai peran dan fungsi instansi teknis dibidang Kebencanaan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau merupakan Badan yang menangani kebencanaan di wilayah Kota Baubau, serta membantu menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penanganan kebencanaan. Hal tersebut di atas dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan nilai tingkat keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau.

Pengukuran dimaksud merupakan hasil suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Pengukuran kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau Tahun 2024 dapat dilakukan dengan cara :

1. Membandingkan rencana dan realisasi
2. Membandingkan realisasi tahun ini dengan tahun lalu
3. Membandingkan realisasi dengan standarnya

Dalam pengukuran evaluasi kinerja diarahkan pada evaluasi kegiatan dan sasaran sebagaimana surat Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor : 58/Kep/IV/2003 tanggal 16 April 2003 perihal Penyempurnaan pedoman penyusunan LAKIP. Pengukuran dimaksud dengan menggunakan skala pengukuran ordinar kinerja, yaitu :

- a. Nilai Capaian Kinerja dari 85 % - 100 % adalah berhasil baik atau sangat berhasil.
- b. Nilai Capaian Kinerja dari 70 % - 85 % adalah sedang, baik atau berhasil.
- c. Nilai Capaian Kinerja dari 55 % - 70 % adalah kurang, sedang atau cukup berhasil.
- d. Nilai Capaian Kinerja 55 % kebawah sangat kurang, kurang baik atau tidak.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara indikator kinerja sasaran yang ditargetkan dengan indikator kinerja sasaran yang terealisasi. Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- 2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

### **3.2. Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau**

Pengukuran tingkat capaian kinerja BPBD Kota Baubau Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja BPBD Kota Baubau Tahun 2024 dengan realisasinya. Uraian Capaian kinerja BPBD Kota Baubau Tahun 2024 dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel. 3.1. Capaian Kinerja BPBD Kota Baubau Tahun 2024

<b>No</b>	<b>Tujuan/Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam penanganan bencana daerah	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,30	0,32	106,67%

	Meningkatnya kualitas penanganan bencana alam	Rata-rata Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) penanganan bencana alam	%	50	66,67%	133,33%
	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Predikat	B	B	B
	Meningkatnya kualitas Kinerja Pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tingkat Capaian indikator program Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nilai	68,20	88,51	129,78%

### **3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis**

Analisis capaian kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan pada unit kerja. Analisis kinerja merupakan analisis dan interpretasi keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja. Dalam melaksanakan analisis kinerja hasilnya dikaitkan dengan Sumber Daya Manusia (SDM), dana, sarana, prasarana, metode kerja dan hal-hal lain yang terkait.

Analisis bertujuan untuk mendapatkan kepastian dalam pencapaian hasil kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam perbaikan pelaksanaan program atau kegiatan di masa yang akan datang. Fungsi dari analisis kinerja untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan

kegagalan suatu organisasi atau instansi yang dalam hal ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau.

Kualitas Penanganan bencana alam merupakan parameter penting dalam menentukan keberhasilan untuk pengurangan resiko bencana. Tolak ukur capaian sasaran adalah meningkatnya kemampuan daerah dan masyarakat dalam melakukan tindakan pengurangan ancaman dan potensi kerugian akibat bencana yang diukur dengan satu indikator. Pengukuran nilai indeks dipengaruhi oleh indikator Program Penanggulangan Bencana. Indikator program tersebut dapat dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 3.2. Indikator Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>	<b>FORMULA INDIKATOR PROGRAM</b>
1	Penanggulangan Bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	$\frac{\text{Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana}}{\text{Jumlah Warga Negara di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$
		Persentase Warga Negara dan Aparat yang mengikuti pelatihan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	$\frac{\text{Jumlah Warga Negara dan Aparat yang mengikuti pelatihan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana}}{\text{Jumlah Warga Negara di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$
		Persentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	$\frac{\text{Jumlah Penanganan Rehabilitasi Rekonstruksi dan/atau Pendampingan Pasca Bencana}}{\text{Jumlah Kejadian Bencana}} \times 100\%$

Penjelasan dari formulasi indikator diatas dijabarkan sebagai berikut :

- a) Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana

Indonesia merupakan negara yang rawan bencana karena dilalui oleh Sirkum Pasifik atau Cincin Api Pasifik, dilewati sabuk Alpide, dan daerahnya berada di wilayah tropis. Daerah rawan bencana adalah daerah yang memiliki risiko tinggi terhadap ancaman terjadinya bencana. Ancaman bencana dapat disebabkan oleh kondisi geografis, geologis, dan demografis, maupun karena ulah manusia.

Warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana adalah warga negara yang mendapatkan informasi tentang wilayah rawan bencana di suatu daerah.

Informasi rawan bencana adalah data, informasi, atau analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi risiko bencana di suatu wilayah. Informasi ini mencakup informasi geografis, ilmiah, sosial, dan ekonomi. Layanan informasi rawan bencana berbasis kajian risiko bencana diberikan kepada warga negara.

Formulasi Perhitungan Indikator program ini adalah :

$$= \frac{\text{Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana}}{\text{Jumlah Warga Negara di Kawasan Rawan Bencana}} \times 100\%$$

Perhitungan Realisasi Indikator Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dilakukan dengan menghitung jumlah peserta kegiatan Sosialisasi, Komunikasi,

Informasi dan Edukasi rawan bencana yang berupa Simulasi dan pengenalan kondisi rawan bencana pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Baubau, yang juga merupakan salah satu program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam upaya pelayanan informasi rawan bencana yang di beri nama Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB).

Peserta kegiatan adalah *warga negara*, yaitu perwakilan Siswa/Siswi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Baubau. Kegiatan ini dilakukan sejak Tahun 2019, sehingga jumlah pesertanya merupakan akumulasi dari siswa yang mengikuti kegiatan sejak tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024. Adapun jumlah peserta kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 3.3. Jumlah Warga Negara (Siswa/Siswi) yang menerima layanan informasi rawan bencana dalam kegiatan Satuan Pendidikan Aman Bencana Kota Baubau

<b>Tahun</b>	<b>Sekolah</b>	<b>Jumlah Peserta</b>	<b>Jumlah Siswa Seluruhnya</b>	<b>Kecamatan/ Realisasi</b>
2019	MIN 1 BAUBAU	20 Orang	1172 Orang	Murhum
	SDN 4 BAUBAU	20 Orang	450 Orang	Wolio
	MTSN BAUBAU	20 Orang	765 Orang	Murhum
	<b>Jumlah</b>	<b>60 Orang</b>	<b>2.387 Orang</b>	<b>2,5%</b>
2020	COVID -19			
2021	SDN 1 LAMANGGA	25 Orang	128 Orang	Murhum
	SDN 2 LAMANGGA	70 Orang	459 Orang	Murhum
	SDN 3 LAMANGGA	25 Orang	176 Orang	Murhum
	SDN 1 WAJO	30 Orang	193 Orang	Murhum
	SDN 2 WAJO	30 Orang	152 Orang	Murhum
	SMPN 2 BAUBAU	104 Orang	941 Orang	Murhum
	SMPN 7 BAUBAU	76 Orang	239 Orang	Murhum
	<b>Jumlah</b>	<b>360 Orang</b>	<b>2.288 Orang</b>	<b>15,73%</b>

2022	SDN 2 KATOBENGKE	50 Orang	250 Orang	Betoambari
	SDN 4 KATOBENGKE	50 Orang	85 Orang	Betoambari
	SMPN 4 BAUBAU	50 Orang	707 Orang	Betoambari
	SMPN 3 BAUBAU	50 Orang	973 Orang	Betoambari
	<b>Jumlah</b>	<b>200 Orang</b>	<b>2.015 Orang</b>	<b>9,92%</b>
2023	SDN 1 TOPA	60 Orang	353 Orang	Betoambari
	SDN 2 TOPA	40 Orang	41 Orang	Betoambari
	SMPN 18 BABAU	50 Orang	661 Orang	Wolio
	SMPN 17 BAUBAU	50 Orang	552 Orang	Wolio
	SMPN 12 BAUBAU	50 Orang	307 Orang	Wolio
	<b>Jumlah</b>	<b>250 Orang</b>	<b>1.914 Orang</b>	<b>13,06%</b>
2024	SDN KARYA BARU	103 Orang	298 Orang	Sorawolio
	SDN 2 BATULO	104 Orang	492 Orang	Wolio
	SDN WANGKANAPI	103 Orang	484 Orang	Wolio
	SMPN 1 BAUBAU	160 Orang	1015 Orang	Wolio
	SMPN 10 BAUBAU	160 Orang	333 Orang	Sorawolio
	SMPN 13 BAUBAU	100 Orang	130 Orang	Sorawolio
	<b>Jumlah</b>	<b>730 Orang</b>	<b>2.752 Orang</b>	<b>26,53%</b>

Realisasi Indikator Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana adalah :

$$\begin{aligned}
 &= \text{Realisasi Tahun (2019 + 2021 + 2022 + 2023 + 2024)} \\
 &= (2,5\% + 15,73\% + 9,92\% + 13,06\% + 26,63\%) \\
 &= \mathbf{67,74\%}
 \end{aligned}$$

- b) Persentase Warga Negara dan Aparat yang mengikuti pelatihan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana

Pencegahan dan mitigasi bencana adalah upaya membangun masyarakat untuk mampu melaksanakan Pencegahan dalam penanggulangan bencana secara mandiri. Kemampuan tersebut diharapkan akan mengurangi dampak dan resiko bencana. Selain itu juga OPD Terkait dan Relawan harus siap menjadi bagian dari

penanggulangan bencana bagi wilayah lain yang terdampak bencana seperti yang selama ini dilakukan di seluruh wilayah Kota Baubau.

Kesiapsiagaan dan mitigasi bencana adalah upaya membangun masyarakat untuk mampu melaksanakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana secara mandiri. Kemampuan tersebut diharapkan akan mengurangi dampak dan resiko bencana.

Terlatihnya aparat dan warga negara yang berada di kawasan rawan bencana yaitu melaksanakan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan penyebarluasan informasi dan edukasi terkait wilayah atau daerah rawan bencana, melalui pelatihan kepada masyarakat yang berada di daerah rawan bencana yang dilakukan. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota yang dilaksanakan diharapkan masyarakat yang mengikuti kegiatan pelatihan dapat lebih memahami berbagai ancaman bencana di wilayahnya, bagaimana cara mengurangi ancaman dan kerentanan yang dimiliki, serta meningkatkan kemampuan/kapasitas dalam menghadapi ancaman/dampak bencana.

Formulasi Perhitungan Indikator program ini adalah :

$$= \frac{\text{Jumlah Warga Negara dan aparat yang mengikuti pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana}}{\text{Jumlah Warga Negara di Kawasan Rawan Bencana}} \times 100\%$$

Perhitungan realisasi indikator program ini menggunakan obyek peserta pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana sebanyak 125 orang, yang terdiri atas Personil Satuan Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau dan perwakilan

warga negara pada kawasan rawan bencana di Kecamatan Sorawolio. Adapun jumlah aparat dan masyarakat yang mengikuti pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 3.4. Jumlah Aparat dan Warga Negara yang mengikuti Pelatihan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Tahun 2024

No	Sub Kegiatan/ Aksi	Jumlah		Keterangan
		Aparat	Warga Negara	
1.	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota ➤ Pelatihan Dasar TRC ➤ Diklat SAR TRC	20 Orang		15 orang Aparat yang mengikuti lebih dari 1 Aksi, sehingga jumlah aparat yang mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana adalah <b>35 Orang</b>
		10 Orang		
2.	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota ➤ Pelatihan Penanganan Bencana Banjir ➤ Kelurahan Tangguh Bencana ➤ Sosialisasi Manajemen Kedaruratan dan Logistik		30 Orang	
		20 Orang	50 Orang	
		30 Orang		
	<b>Jumlah</b>	<b>50 Orang</b>	<b>110 Orang</b>	

Jumlah Aparat/Satgas yang mengikuti kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana Tahun 2024 adalah **50 - 15 = 35 Orang**.

Sedangkan Jumlah Warga Negara yang mengikuti kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana Tahun 2024 adalah **110 Orang**.

Berdasarkan pendataan yang dilakukan pada Kecamatan Sorawolio, Jumlah masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana di Kecamatan Sorawolio adalah **306 Orang**.

Realisasi Indikator Perse ntase Persentase Warga Negara dan Aparat yang mengikuti pelatihan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana adalah :

$$= \frac{35 \text{ Orang Aparat} + 110 \text{ Orang Warga Negara}}{306 \text{ Orang}} \times 100\%$$

$$= \frac{145 \text{ Orang}}{306 \text{ Orang}} \times 100\%$$

$$= 47,39 \%$$

Pada indikator sasaran terselenggaranya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota terealisasi sebesar **47,39%**, yang diperoleh dari perbandingan Jumlah Warga Negara dan Aparat yang mengikuti pelatihan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan Jumlah Warga Negara di kawasan rawan bencana sehingga capaian kinerja indikator tersebut adalah **78,98%**.

c) Persentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

Penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana adalah upaya pemulihan dan pembangunan kembali sarana, prasarana, dan kelembagaan yang rusak akibat bencana.

Tujuan rehabilitasi dan rekonstruksi :

- Memulihkan kehidupan masyarakat yang lebih baik dari sebelum terjadinya bencana
- Memulihkan sendi-sendi pembangunan secara lebih baik, lebih aman, dan berkelanjutan
- Membangun kembali seluruh sendi kehidupan masyarakat yang terkena bencana

Formulasi untuk perhitungan indikator ini adalah :

$$= \frac{\text{Jumlah Penanganan Rehabilitasi Rekonstruksi dan/atau Pendampingan Pasca Bencana}}{\text{Jumlah Kejadian Bencana}} \times 100\%$$

Tahun 2024, bencana yang terjadi sebanyak 22 kejadian, dengan rincian 20 Kejadian pohon Tumbang dan 2 Kejadian Banjir. Dari 20 Kejadian Pohon Tumbang tersebut, hanya ada 4 kejadian pohon tumbang yang menimbulkan dampak bencana dan merugikan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka yang dijadikan obyek perhitungan adalah jumlah kejadian banjir dan kejadian pohon tumbang yang menimbulkan dampak atau merugikan masyarakat. Sehingga jumlah seluruh kejadian bencana yang dimasukkan dalam formulasi diatas adalah **6 Kejadian**.

Penanganan pasca bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau pada Tahun 2024 berupa kegiatan sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana dan/atau masyarakat yang terkena dampak dari bencana.

1. Sosialisasi Pemulihan Kembali Prasarana dan Sarana Infrastruktur Akibat Bencana
2. Pelatihan Fasilitasi Pemberdayaan Kehidupan Sosial Ekonomi Dampak Bencana

Penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau adalah penanganan yang berbentuk non fisik, seperti kegiatan Sosialisasi, Pelatihan dan Pendampingan pada Masyarakat yang terkena dampak dari bencana yang terjadi.

Rehabilitasi dan rekonstruksi non fisik pasca bencana adalah upaya untuk memulihkan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana. Rekonstruksi non fisik meliputi perumusan kebijakan dan langkah-langkah nyata untuk membangun kembali kehidupan sosial dan budaya masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Realisasi indikator Penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana pada tahun 2024 adalah :

$$\begin{aligned} &= \frac{2 \text{ (Penanganan Non Fisik)}}{6 \text{ (Kejadian Bencana)}} \times 100\% \\ &= 33,33 \% \end{aligned}$$

d) Pada indikator Persentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana terealisasi sebesar 33,33%. Persentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi diperoleh dari perbandingan jumlah penanganan dan/atau pendampingan pasca bencana yang dilaksanakan dengan jumlah seluruh kejadian bencana.

Berdasarkan formulasi pengukuran atas indikator program, maka target dan realisasi serta capaian indikator kinerja Program Penanggulangan Bencana tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5. Target dan Realisasi Indikator Program Tahun 2024

<b>No</b>	<b>Indikator Program</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
1	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	60%	67,74%	112,9%
2	Persentase Warga Negara dan Aparat yang mengikuti pelatihan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	60%	47,39%	78,98%
3	Persentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	55%	33,33%	60,61%
4	Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan	100%	98,21%	98,21%

Uraian Capaian kinerja BPBD Kota Baubau Tahun 2024 dijabarkan sebagai berikut :

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja dari tujuan dan sasaran strategis BPBD Kota Baubau Tahun 2024 dijabarkan pada tabel 3.6 :

Tabel. 3.6. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja dari Tujuan/Sasaran Strategis BPBD Kota Baubau Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam penanganan bencana daerah	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,30	0,32	106,67%
	Meningkatnya kualitas penanganan bencana alam	Rata-rata Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) penanganan bencana alam	%	50	66,67%	133,33%
	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Predikat	B	B	B
	Meningkatnya kualitas Kinerja Pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tingkat Capaian indikator Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nilai	68,20	88,51	129,78%

Pengkajian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dilakukan dengan mengidentifikasi status kemampuan lembaga pemerintah dalam

menangani ancaman dengan sumber daya yang tersedia untuk melakukan tindakan pencegahan, mitigasi, dan mempersiapkan penanganan darurat, serta menangani kerentanan yang ada dengan kapasitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kota Baubau.

Pada dokumen ini, penilaian kapasitas dilakukan dengan melakukan survey kepada OPD terkait ketahanan daerah yang terdapat di Kota Baubau. Pertanyaan - pertanyaan yang diberikan yaitu sebanyak 284 butir pertanyaan dengan 7 prioritas program penanggulangan risiko bencana dan memiliki 71 indikator berdasarkan kepada Perka No. 03 Tahun 2012 BNPB tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana. Penilaian terhadap parameter dan indikator akan menghasilkan nilai indeks untuk setiap jenis bahaya yang berpotensi. Nilai indeks per bencana tersebut akan dikelompokkan ke dalam kelas kapasitas daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

- Kelas tinggi dengan nilai indeks kesiapsiagaan 0,8 - 1.
- Kelas sedang dengan nilai indeks kesiapsiagaan 0,4 - 0,7.
- Kelas rendah dengan nilai indeks kesiapsiagaan 0 - 0,3.

Hasil penilaian Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk Nilai IKD Kota Baubau Tahun 2024 **adalah 0,32**. Nilai tersebut masuk dalam Level **Rendah**. Kondisi tersebut sesuai dengan capaian kinerja BPBD Kota Baubau berdasarkan pada Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Kapasitas Daerah (Kebencanaan) Kota Baubau.

Persentase respon cepat darurat bencana diperoleh dari pelaksanaan kegiatan kaji cepat yang dilaksanakan pada saat tanggap

darurat di daerah terdampak bencana sesuai dengan laporan kejadian bencana yang masuk dengan kejadian bencana yang ditangani sehingga diperoleh data kebutuhan korban bencana dan penentuan peralatan apa yang digunakan untuk penanganan penanggulangan bencana yang terjadi sehingga lebih cepat dan efektif.

Bencana yang terjadi disebabkan oleh Cuaca Ekstrim yaitu curah hujan yang tinggi yang menyebabkan terjadinya banjir dan angin kencang yang menyebabkan pohon tumbang serta ambruknya bangunan. Berdasarkan data kejadian bencana tahun 2024, banjir terjadi sebanyak **2 kali** yaitu bulan Januari dan bulan Juli, pohon tumbang sebanyak **3 kali** yaitu bulan Januari, Februari dan Juli dan bangunan rubuh **1 kali** yaitu bulan Oktober.

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh APIP Inspektorat Kota Baubau, nilai SAKIP Baubau untuk Tahun 2024 adalah **62,68** dengan **Predikat B**. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau, dengan rincian sebagai berikut :

<b>Komponen</b>	<b>Bobot</b>	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>
a. Perencanaan Kinerja	30%	20,13
b. Pengukuran Kinerja	30%	12,85
c. Pelaporan Kinerja	15%	11,19
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	18,50
<b>Jumlah</b>	<b>100%</b>	<b>62,68</b>

Nilai SAKIP Tahun yang diperoleh pada Tahun 2024 lebih rendah dari nilai SAKIP Tahun 2023, yaitu 68,10. Namun Predikatnya tetap sama yaitu Predikat B.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra

Perbandingan realisasi indikator kinerja pada tahun 2024 dengan target jangka menengah Renstra 2018 – 2023 dan Renstra 2024 - 2026 dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 3.7. Perbandingan target dan Realisasi Indikator Kinerja dari sasaran strategis BPBD Kota Baubau Tahun 2023 dan 2024

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Ket
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
<b>Renstra 2019 - 2023</b>								
Meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana	Indeks kapasitas dalam penanggulangan bencana	84,05 %	85,71 %	98,02 %				
Meningkatnya capaian pelaksanaan program pendukung sasaran RENSTRA OPD	Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung OPD	100 %	99,86 %	99,86 %				
<b>Renstra 2024 – 2026</b>								
Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Masyarakat dalam Penanganan Bencana Daerah	Indeks Ketahanan Daerah				0,30	0,32	106,67 %	

Meningkatnya Kualitas Penanganan Bencana Alam	Rata-Rata Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Penanganan Bencana Alam				50%	66,67 %	133,34 %	
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah				B	B	B	
Meningkatnya kualitas Kinerja Pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tingkat Capaian Indikator Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah				68,20	88,51	129,78 %	

Pada Tahun 2023 dan 2024 terdapat perbedaan indikator kinerja, karena Tahun 2023 merupakan tahun terakhir dari Renstra 2019-2023, dan terlihat bahwa target indikator kinerja tahun 2023 dapat tercapai bahkan melampaui target yang ditentukan.

Sedangkan pada Tahun 2024 pada umumnya indikator kinerjanya dapat mencapai target yang ditentukan, kecuali pada indikator Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mengalami penurunan nilai dari 68,10 menjadi 62,65.

### 3. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja pada Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja pada Tahun 2024 dengan target jangka menengah Renstra 2019-2023 dan Renstra 2024-2026 dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 3.8. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja pada Tahun 2024 dengan target jangka menengah Renstra 2019 - 2023 dan Renstra 2024 – 2026

No	IKU	Satuan	Target Tahun								Realisasi Kinerja		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	
<b>Renstra 2019 – 2023</b>													
1	Indeks kapasitas dalam penanggulangan bencana	%	59,19	65,40	71,62	77,83	84,05					85,71	
2	Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung OPD	%	100	100	100	100	100					99,86	
<b>Renstra 2024 – 2026</b>													
1	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks							0,30	0,32	0,34		0,32
2	Rata-Rata Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Penanganan Bencana Alam	%							50	55	60		66,67
3	Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Predikat							B	B	B		B
4	Tingkat Capaian Indikator Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nilai							68,20	68,30	68,40		88,51

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap

Warga Negara secara minimal. Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, maka terdapat 3 jenis pelayanan dasar pada Sub Urusan Bencana yang wajib dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu :

1. Pelayanan informasi rawan bencana
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Adapun Target nasional dari ketiga jenis pelayanan dasar tersebut adalah 100% setiap tahun. Olehnya itu perbandingan antara target nasional dengan capaian Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9. Target Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Jenis Pelayanan Dasar		Target (%)	Capaian (%)	Indikator Pencapaian	Target (%)	Capaian (%)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pelayanan informasi rawan bencana	100	100	Persentase Pencapaian Penerimaan Layanan	80	80
				Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar	20	20

Jenis Pelayanan Dasar		Target (%)	Capaian (%)	Indikator Pencapaian	Target (%)	Capaian (%)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan	100	100	Persentase Pencapaian Penerimaan Layanan	80	80
				Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar	20	20
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (Kebencanaan)	100	100	Persentase Pencapaian Penerimaan Layanan	80	80
				Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar	20	20

Realisasi pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana Kota Baubau Tahun 2024 yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.10. Hasil Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana Kota Baubau Tahun 2024

KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM						
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	Ket
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)
KATEGORI PENCAPAIAN KEBENCANAAN						
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN		TUNTAS PARIPURNA			100.00 %	
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)				100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPBD KOTA BAUBAU TAHUN 2024**

KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM							
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	Ket
(1)	(2)		(3)			(4)	(5)
			Yang Harus Dilayani				
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>		108,950	108,950	0	100.00 %	
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					20.00 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus dilayani	Jumlah Mutu Yang Harus dilayani	Mutu Yang Belum terlayani	100.00 %	
	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	dokumen	1	1	0	100.00%	
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	orang	2926	2926	0	100.00%	
	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	orang	100	100	0	100.00%	
	4 . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	unit	20	20	0	100.00%	
2 .	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)</b>					100.00 %	
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>		450	450	0	100.00 %	
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					20.00 %	

KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM							
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	Ket
(1)	(2)		(3)			(4)	(5)
			Jumlah Mutu Yang Harus dilayani	Jumlah Mutu Yang Harus dilayani	Mutu Yang Belum terlayani	100.00 %	
	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, .... dll)	unit	93	93	0	100.00 %	
	2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Orang	160	160	0	100.00 %	
3 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)		(100%)			100.00 %	
	Tidak Terjadi Bencana (Lampirkan dokumen tahapan SPM)						

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja BPBD Kota Baubau tahun 2024 untuk meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana adalah sebagai berikut :

- Dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program dan kegiatan;
- Kesadaran masyarakat akan ancaman bencana semakin tinggi sehingga menuntut mereka untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menurunkan resiko bencana;

- Mengoptimalkan aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau dalam pencari, pertolongan dan evakuasi korban bencana
- Meningkatkan sarana dan prasarana untuk pencarian, petolongan dan evakuasi korban bencana.
- Melakukan koordinasi dengan dinas terkait dalam urusan penanggulangan bencana di wilayah Kota Baubau.

Selain faktor penentu keberhasilan, terdapat juga faktor penghambat, yaitu :

- Sinergitas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana antara pemerintah, swasta dan masyarakat belum maksimal;
- Terbatasnya ruang terbuka publik beserta sarana dan prasarananya yang akan digunakan sebagai tempat evakuasi pada saat bencana;
- Terbatasnya akses evakuasi karena tingkat kepadatan pemukiman penduduk;
- Belum memadainya sarana dan prasarana penanganan bencana baik secara kuantitas maupun kualitas;
- Belum terpenuhinya SDM baik secara kuantitas maupun kualitas yang memiliki kompetensi yang mumpuni dalam penanggulangan bencana.

Beberapa solusi yang telah dilakukan adalah :

- Membangun koordinasi yang sinergis antara masyarakat pada tingkat kelurahan hingga tingkat kota dalam penyelenggaraan

penanggulangan bencana;

- Memfasilitasi Tim Satgas Penanggulangan Bencana dalam evakuasi dan assessment awal bencana;
- Melaksanakan simulasi penanggulangan bencana bersama-sama masyarakat maupun swasta;
- Membangun kebersamaan dan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana.

## 6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

### a. Sumber Daya Manusia

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau didukung oleh 18 orang Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan organisasi dengan tugas dan fungsi yang ada. Selain personil tersebut, dalam melaksanakan tugasnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau juga dibantu oleh satuan tugas penanggulangan bencana BPBD Kota Baubau.

### b. Sumber Daya Peralatan (Sarana dan Prasarana)

Peralatan yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau diperoleh dari BNPB dan dukungan APBD Kota Baubau, dengan jumlah dan jenisnya yang sudah cukup. Akan tetapi, peralatan yang ada tersebut sudah banyak yang rusak sehingga cenderung menyulitkan personil APBD Kota Baubau saat bekerja. Karena itu, saat ini sangat dibutuhkan peralatan yang memadai seperti Alat Pelindung Diri (*Personal Protecting Equipment*) dan kendaraan operasional.

c. Sumber Daya Keuangan

Alokasi anggaran yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota Baubau pada Tahun 2024 masih sangat terbatas, sehingga masih ada kegiatan yang belum dapat maksimal pelaksanaannya.

Dalam realisasi anggaran BPBD Kabupaten Karawang pada tahun anggaran 2023 dialokasikan untuk membiayai program yang mendukung pencapaian sasaran strategis dan indikator sasaran, adapun efisiensi penggunaan sumber daya anggaran tahun 2024 terhadap sasaran strategis, indikator sasaran, dan program disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.11. Tingkat Efisiensi Kinerja dan Keuangan BPBD Tahun 2024

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Keuangan				Tingkat Efisiensi (%)
		Target	Realisasi	%	Program	Pagu	Realisasi	%	
Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Masyarakat dalam Penanganan Bencana Daerah	Indeks Ketahanan Daerah	0,30	0,32	106,67	Program Penanggulangan Bencana	656.753.200	623.583.500	94,95	5,05
Meningkatnya Kualitas Penanganan Bencana Alam	Rata-Rata Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Penanganan Bencana Alam	50	66,67	133,34					
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	B	B	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.334.502.558	3.292.281.687	98,73	1,27
Meningkatnya kualitas Kinerja Pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tingkat Capaian Indikator Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah	68,20	88,51	129,78					
<b>Rata - Rata Capaian</b>				<b>117,45</b>	<b>Total Realisasi</b>	<b>4.079.659.918</b>	<b>3.896.687.619</b>	<b>96,84</b>	<b>3,16</b>

Catatan :

Tingkat Efisiensi =  $100\% - \% \text{ Realisasi Keuangan}$

Tujuan/Sasaran strategis :

1. *Tujuan : Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Masyarakat dalam Penanganan Bencana Daerah.*

*Sasaran : Meningkatnya Kualitas Penanganan Bencana Alam*

Berdasarkan tabel efisiensi kinerja diatas dapat disampaikan bahwa nilai realisasi tujuan/sasaran tersebut nilai capaian kerjanya adalah 106,67 dan 133,34, sedangkan realisasi keuangannya 94,95%. sehingga dapat dikatakan bahwa penggunaan anggarannya efisien.

2. *Tujuan : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah*

*Sasaran : Meningkatnya kualitas Kinerja Pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah*

Nilai realisasi kinerja sasaran strategis ini tercapai 100 % dan 129,78 %, sedangkan realisasi keuangannya 98,73 %, sehingga sasaran strategis dan indikator kinerja ini dapat dikatakan efisien dalam penggunaan anggaran.

Efisiensi tersebut disebabkan oleh adanya sinergi/kerjasama yang baik antara aparatur, masyarakat dan relawan, serta penggunaan anggaran kegiatan yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/kegiatan/sub kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau Tahun 2024 dalam menunjang pencapaian kinerja yang ditargetkan dan berdasarkan IKU dapat ditampilkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.12. Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau Tahun 2024.

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan
1.	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Masyarakat dalam Penanganan Bencana Daerah	Indeks Ketahanan Daerah	0,30	Program Penanggulangan Bencana	1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
	Meningkatnya Kualitas Penanganan Bencana Alam	Rata-Rata Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Penanganan Bencana Alam	50		
	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	B	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
	Meningkatnya kualitas Kinerja Pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tingkat Capaian Indikator Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah	68,20		

					Pemerintahan Daerah
					7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

### 3.4. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran dilakukan pada tahapan - tahapan yang dilalui mulai dari perumusan rencana keuangan, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi atas kinerja keuangan. Berkaitan dengan hal tersebut dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau secara garis besar terdiri atas Belanja Operasi dan Belanja Modal.

Uraian Belanja Operasi dan Belanja Modal berdasarkan DPA Tahun 2024 Setelah Perubahan dengan realisasi sebagai berikut :

Tabel 3.13. Uraian Belanja Operasi dan Belanja Modal berdasarkan DPA Tahun 2024 Setelah Perubahan

No	Uraian Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Operasi	3.959.255.758	3.884.119.187	98,10 %
2	Belanja Modal	32.000.000	31.746.000	99,21 %
<b>Jumlah</b>		<b>3.991.255.758</b>	<b>3.915.865.187</b>	<b>98,11 %</b>

Pada tahun 2024 BPBD Kota Baubau melaksanakan 2 Program yang terbagi kedalam 12 Kegiatan dan 40 Sub Kegiatan, dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.14. Realisasi Anggaran Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
<b>I</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.365.419.010</b>	<b>3.292.281.687</b>	<b>98,73%</b>
1.	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	65.446.800	65.446.800	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.393.500	11.393.500	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.772.000	5.772.000	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9.326.200	9.326.200	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6.000.000	6.000.000	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	10.633.300	10.633.300	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.077.900	11.077.900	100%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.243.900	11.243.900	100%
2.	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	2.121.164.008	2.093.917.496	98,72%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.081.922.158	2.054.902.996	98,70%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	28.347.000	28.250.000	99,66%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.205.000	5.083.500	97,67%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	5.689.850	5.681.000	99,84%
3.	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	12.222.700	12.218.800	99,97%
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.932.900	5.932.000	99,98%

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPBD KOTA BAUBAU TAHUN 2024**

	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.289.800	6.286.800	99,95%
4.	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>10.459.800</i>	<i>10.456.000</i>	<i>100%</i>
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.459.800	10.456.000	99,96%
5.	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>446.258.800</i>	<i>445.953.241</i>	<i>99,93%</i>
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.200.500	29.155.000	99,84%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.050.000	40.050.000	100%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.234.300	7.230.000	99,94%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000	3.560.000	98,89%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.622.000	25.579.500	99,83%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	340.552.000	340.378.741	99,95%
6.	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>32.000.000</i>	<i>31.746.000</i>	<i>99,21%</i>
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.000.000	31.746.000	99,21%
7.	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>440.070.450</i>	<i>431.721.450</i>	<i>98%</i>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.700.000	11.700.000	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43.401.450	43.321.450	99,82%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.549.000	21.500.000	99,77%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	363.420.000	355.200.000	97,74%
8.	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>206.880.000</i>	<i>200.821.900</i>	<i>97%</i>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	69.060.000	63.077.500	91,34%

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPBD KOTA BAUBAU TAHUN 2024**

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	69.760.000	69.739.900	99,97%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.680.000	16.655.000	99,85%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	31.680.000	31.649.500	99,90%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.700.000	19.700.000	100%
	<b>Program Penanggulangan Bencana</b>	<b>656.753.200</b>	<b>623.583.500</b>	<b>94,95%</b>
1.	<i>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</i>	<i>31.689.000</i>	<i>31.487.000</i>	<i>99,36%</i>
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	31.689.000	31.487.000	99,36%
2.	<i>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</i>	<i>492.611.408</i>	<i>512.298.200</i>	<i>97,56%</i>
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	15.196.000	15.196.000	100%
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	66.297.000	65.665.000	99,05%
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	25.986.800	25.136.800	96,73%
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	111.407.000	107.407.000	96,41%
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	306.207.400	298.893.400	97,61%
3.	<i>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</i>	<i>18.153.000</i>	<i>2.100.000</i>	<i>11,57%</i>
	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	6.121.000	-	0%
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	6.032.000	-	0%

	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	6.000.000	2.100.000	35%
4.	<i>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</i>	<i>81.817.000</i>	<i>77.698.300</i>	<i>94,97%</i>
	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten / Kota	14.983.000	14.983.000	100%
	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	66.834.000	62.715.300	93,84%

Tabel 3.15. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan BPBD Kota Baubau Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
<b>I</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100 %</b>	<b>98,21%</b>	<b>98,21%</b>
1.	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	2 Laporan	100%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Laporan	100%
2.	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/ Bulan	252 Orang	100%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	100%

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%
3.	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	100%	100%	100%
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2 Laporan	100%
4.	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	100%	100%	100%
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5.	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100%	100%	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Paket	3 Paket	100%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	1 Paket	100%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket	100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Dokumen	1 Laporan	100%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%
6.	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100%	100%	100%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Unit	4 Unit	4%
7.	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	1 Laporan	100%

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	100%
8.	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	85,71%	85,71%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14 Unit	8 Unit	66,67%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Unit	2 Unit	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24 Unit	24 Unit	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1 Unit	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	1 Unit	100%
	<b>Program Penanggulangan Bencana</b>		<b>79,17%</b>	<b>79,17%</b>
1.	<i>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</i>	100%	100%	100%
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	100 Orang	100 Orang	100%
2.	<i>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</i>	100%	100%	100%
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	8 Kawasan	8 Kawasan	100%
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	25 Orang	25 Orang	100%
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	400 Orang	400 Orang	100%
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	300 Keluarga	300 Keluarga	100%

	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	4 Kawasan	4 Kawasan	100%
3.	<i>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</i>	<i>100%</i>	<i>16,67%</i>	<i>16,67%</i>
	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	1 Laporan	0	0%
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	0%
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	10 Orang	2 Orang	20%
4.	<i>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten / Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1. Kesimpulan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau Tahun 2024 pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran selama tahun anggaran 2024. Penyusunan LAKIP juga sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, yang memuat tentang laporan pencapaian kinerja yang telah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau. LAKIP juga merupakan wujud dari pertanggungjawaban terhadap keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapai yang disusun secara jujur, objektif, akurat dan transparan.

Proses penyusunan LAKIP terdiri dari pengumpulan data-data yang dibutuhkan seperti Rencana Strategis, Rencana Kerja tahunan dan Perjanjian Kinerja. Disamping hal tersebut, dilakukan juga evaluasi capaian kinerja dengan data-data yang akurat, evaluasi realisasi keuangan dan analisis efisiensi. Dalam pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau Tahun 2024 secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan telah dicapai dengan baik, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan atau kendala.

**4.2. Saran**

1. Diharapkan adanya perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan tenaga penanggulangan bencana baik kuantitas maupun kualitas dan pemerataan distribusinya sesuai kebutuhan, sehingga setiap tenaga dapat bekerja secara profesional sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan bidang keahliannya.
2. Komitmen yang kuat dari Pemerintah dan masyarakat perlu terus ditingkatkan guna mendukung optimalisasi upaya peningkatan pengurangan resiko bencana guna meminimalisir jatuhnya korban jiwa maupun harta benda masyarakat dan fasilitas publik khususnya yang terkait dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana daerah.
3. Peningkatan koordinasi lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat di bidang penanganan dan penanggulangan bencana daerah.
4. Dukungan anggaran daerah untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penanganan dan penanggulangan bencana sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan akses dan kualitas pelayanan penanganan dan penanggulangan bencana dimasyarakat.
5. Perlu adanya kesadaran dari Pemerintah Kota Baubau dalam menyediakan dana kebencanaan secara baik terkait kontingensi bencana sesuai dengan Undang – undang yang ada.